

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)**

Tantriani Sukmaningrum
Puji Harto, SE., M.Si, Akt

ABSTRACT

This study aims to determine factors influencing local government financial statement quality. Based on PP No. 24 year 2005, state and local government financial statement quality have to meet the qualitative characteristic. Factors examined include quality of human resources, internal control systems, and external factors.

Data collection is done by giving as many as 150 copies of the questionnaire, which was distributed to respondents who are staff on the unit of Work Of The Office of financial management and assets (DPKAD) of The City of Semarang and Office of the revenue and the Financial Management Area (DPPKD) of Semarang Regency. The Data obtained are then analyzed using SPSS 17.00.

Test results showed that the internal control systems have significant positive impact on information quality of local government financial statement, while competency of human resources do not affect. Competency of human resources are not significant due to the lack of quality and quantity on human resources itself. External factors can not be used as a moderating relationship between the competence of human resources and the system of internal control to the quality of financial reporting information. External factors role as a independent variable and has no effect on the quality of financial reporting information. External factors are not affect due to the dynamics of the sector of Government not accommodated by the readiness of the human resources and not proactive toward public pressures.

Key Words : *local government financial statement quality, information value, quality of human resources, internal control system, external factors.*

I. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Huang *et al*, 1999 dalam Xu *et al*, 2003). Agar bermanfaat, informasi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. Dari hasil audit BPK atas LKPD selama tujuh tahun, dari tahun 2004-2010, BPK memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan Opini LKPD 2004-2010

Tahun	OPINI								Σ
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2004	21	7,32	249	86,76	10	3,48	7	2,44	287
2005	17	4,70	308	85,08	12	3,31	25	6,91	362
2006	3	0,65	326	70,41	28	6,05	106	22,89	463
2007	4	1	283	60	59	13	123	26	469
2008	13	3	323	67	31	6	118	24	485
2009	15	4	330	66	48	10	106	21	499
2010	32	9	271	76	12	3	43	12	358*

*^{s)} sampai dengan semester I 2011
(sumber: www.bpk.go.id)

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun

LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: Xu *et al.* (2003); Choirunisah (2008); Indriasari dan Nahartyo (2008); Nugraha dan susanti (2010); Winidyaningrum dan Rahmawati (2010). Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah, penelitian ini menarik untuk meneliti kembali faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

II. TELAAH TEORI

Teori kegunaan-keputusan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *SFAC* No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder.

Teori kegunaan-keputusan informasi sangat relevan, karena Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia mengadopsi karakteristik kualitatif dari *SFAC* No.2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

Teori Stakeholder

Freeman (1984) dalam Mainardes *et al.* (2011) menjelaskan *Stakeholder theory*, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbeda tentang *Stakeholder theory*, prinsipnya sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick *et al.*, 1992 dalam Mainardes *et al.*, 2011)

Berdasarkan kajian mendalam literatur Bovaird (2005), Frey (2003), Reidl (2004) dalam Huda (2009) mengidentifikasi sembilan stakeholder administrasi lokal, yaitu:

1. Masyarakat
2. Bisnis
3. Administrasi publik lain
4. Politisi
5. Parlemen dan lembaga peradilan
6. *Non Governmental Organization* (NGO), *International Organization* (IO), dan asosiasi
7. Media

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya

Dimensi Kualitas Informasi

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
 - c. Tepat waktu
 - d. Lengkap
2. Andal
 - a. Penyajian Jujur
 - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
 - c. Netralitas
 3. Dapat dipahami
 4. Dapat dibandingkan

Berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Indriasari (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak

berhasil membuktikan pengaruh kapabilitas sumberdaya manusia terhadap ketepatan waktu penyampaian informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

2. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

- 1. Effectiveness and efficiency of operations*
- 2. Reliability of financial reporting*
- 3. Compliance with applicable laws and regulations.”*

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2005) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan.

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum yang meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.
2. Pengendalian aplikasi yang meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H₂: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana *strategic* dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan kualitas laporan keuangan meningkat atau menurun. Xu *et al.* (2003) membuktikan bahwa faktor eksternal merupakan faktor kritis yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi.

H₃ : Faktor eksternal memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan

H₄: Faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan

III. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten dan Kota Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa DPKAD/ DPPKD merupakan SKPD yang melakukan konsolidasi laporan keuangan semua SKPD dalam lingkup kabupaten dan/ atau kota dan menghasilkan output akhir berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten dan/atau kota

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Hair et al*:

$$\begin{aligned}\text{Sampel} &= 5 \times \text{Parameter penelitian} \\ &= 5 \times 23 \\ &= 115\end{aligned}$$

Definisi Operasional Variabel

(1) Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (PP No. 24 Tahun 2005), yakni:

- a. Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan
- b. Ketepatan pelaporan laporan keuangan
- c. Kelengkapan informasi yang disajikan
- d. Penyajian secara jujur

- e. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi
- f. Keakuratan informasi yang disajikan
- g. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya
- h. kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan

(2) Sumber Daya Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia (xu *et al*, 2003), yakni:

- a. Pemahaman terhadap peraturan dan standar
- b. Interaksi dengan sistem
- c. Kontrol terhadap SDM
- d. Pendidikan dan training

(3) Sistem Pengendalian Intern

Indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian intern (choirunisah, 2008), yakni:

- a. Integritas data.
- b. Ketepatan input dan posting data.
- c. Prosedur otorisasi dokumen transaksi
- d. Tersimpannya dokumen sumber data
- e. Pembagian tanggungjawab
- f. Penentuan kebijakan dan standar akuntansi
- g. Implementasi kebijakan dan standar

(4) Faktor Eksternal

Indikator yang digunakan untuk menilai faktor eksternal (Xu *et al*, 2003), yakni:

- a. Kemajuan IT
- b. Perkembangan web dan teknologi internet
- c. Perubahan standar pelaporan
- d. Perubahan regulasi pemerintah secara global

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survey lapangan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan secara langsung kepada responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan lima point skala Likert, dengan perincian sebagai berikut:

angka 1 = sangat tidak setuju (STS)

angka 2 = tidak setuju (TS)

angka 3 = netral (NS)

angka 4 = setuju (S)

angka 5 = sangat setuju (SS)

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 17, yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$\text{KUAL.LK} = b_0 + b_1 \text{SDM} + b_2 \text{SPI} + b_3 \text{SDM} * \text{EKS} + b_4 \text{SPI} * \text{EKS} + e$$

Dimana:

KUAL.LK = Kualitas informasi laporan keuangan

SDM = Kompetensi Sumber daya manusia

SPI = Sistem Pengendalian Intern

EKS = Faktor Eksternal

e = Error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Kuesioner yang disebar sebanyak 150 kuesioner. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar, sebanyak 130 kuesioner kembali dan dapat digunakan sebagai bahan analisis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat dijelaskan mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden dapat dilihat melalui demografi responden. Demografi tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang pegawai pemerintah daerah yang bekerja dalam SKPD DPKAD dan/atau DPPKD. Demografi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, pendidikan, dan lama bekerja.

Tabel 2
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
JENIS KELAMIN	Pria	64	49,23%
	Wanita	66	50,77%
PENDIDIKAN	Akuntansi	61	46,92%
	Non akuntansi	69	53,08%
LAMA BEKERJA	1-5 tahun	35	26,92%
	6-10 tahun	32	24,62%
	10-15 tahun	24	18,46%
	15-20 tahun	19	14,46%
	20 tahun keatas	20	15,38%

Sumber : Data primer 2011, diolah.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi. Hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KUALLK	130	17.00	40.00	33.0923	4.39776
SDM	130	10.00	20.00	16.5154	2.01635
SPI	130	21.00	35.00	28.7923	3.61885
EKS	130	8.00	20.00	15.6154	1.85265
Valid N (listwise)	130				

Sumber: Data primer 2011, diolah.

Uji Independent T-Test

Uji independent t-test dilakukan untuk mengetahui apakah kedua *group sample* memiliki persepsi yang berbeda terhadap variabel yang menjadi fokus penelitian yaitu kualitas informasi laporan keuangan

Tabel 4
Hasil Uji Independent T-test
Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
KUALLK	Equal variances assumed	.510	.477	1.283	126	.202	.94415	.73618	-.51272	2.40103
	Equal variances not assumed			1.299	116.946	.196	.94415	.72683	-.49530	2.38361
SDM	Equal variances assumed	.092	.762	-1.372	126	.172	-.47799	.34834	-1.16733	.21136
	Equal variances not assumed			-1.400	119.310	.164	-.47799	.34150	-1.15417	.19819
SPI	Equal variances assumed	.403	.527	1.084	126	.280	-.70314	.64861	-1.98673	.58044
	Equal variances not assumed			1.106	119.334	.271	-.70314	.63583	-1.96211	.55582
EKS	Equal variances assumed	5.123	.025	1.432	126	.155	-.47346	.33054	-1.12759	.18067
	Equal variances not assumed			1.517	125.998	.132	-.47346	.31203	-1.09096	.14404

Sumber :Data primer 2011, diolah.

Dari tabel 4 diketahui bahwa nilai signifikansi (2-tailed) menunjukkan angka diatas 0,05 dan dapat disimpulkan bahawa antara populasi kota dan kabupaten memiliki rata-rata variabel yang sama.

Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji Validitas

Menurut Ghazali (2007), kuesioner dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi korelasi skornya setiap butir pertanyaan terhadap total skornya untuk masing-masing variabel.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Level Signifikansi		Keterangan
		0,01	0,05	
Kualitas Informasi laporan Keuangan	8		0.05	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	4		0.05	Valid
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	7	0,01	0.05	Valid
Faktor Eksternal (EKS)	4	0,01	0.05	Valid

Sumber :Data primer 2011, diolah.

Tabel 5 di atas membuktikan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dinilai reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007). Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach Alpha di atas 0,60 (Nunally, 1960 dalam Ghazali, 2007).

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	KUALLK	SDM	SPI	EKS
Cronbach Alpha	0,914	0,729	0,785	0,679
Keterangan	Reliabel	Reliabel	Reliabel	Reliabel

Sumber: Data primer 2011, diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki Cronbach Alpha di atas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa instrument kuesioner tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		128
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.92422925
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.047
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		1.237
Asymp. Sig. (2-tailed)		.094

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber :Data primer 2011, diolah.

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa nilai asymp.sig sebesar 0,094 setelah dilakukan penghapusan data outlier sebanyak 2 data. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel-variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Untuk menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat pada

tolerance value atau *Variance Inflation Factors (VIF)*. Jika nilai *tolerance value* di bawah 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* di atas 10 maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2007).

Tabel 8
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.190	2.848		2.524	.013		
SDM	.330	.168	.156	1.966	.051	.645	1.551
SPI	.654	.096	.575	6.787	.000	.568	1.759
EKS	.118	.156	.053	.756	.451	.827	1.210

a. Dependent Variable: KUALLK

Sumber : Data primer 2011, diolah.

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 8 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* di atas 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Hasil ini didapat setelah menghilangkan variabel interaksi antara SDM dan EKS serta SPI dan EKS. Variabel independen ini tidak dapat memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Dalam penelitian ini, untuk menguji ada atau tidaknya indikasi heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser.

Tabel 9
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.653	1.798		.919	.360
	SDM	.116	.106	.122	1.098	.274
	SPI	-.091	.061	-.176	-1.495	.137
	EKS	.082	.099	.081	.832	.407

a. Dependent Variable: Absut

Tabel 9 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen absolut residual. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi semua variabel independen di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi, dapat dikatakan model regresi bebas dari heterokedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Uji Hipotesis

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.494	.482	2.95939

a. Predictors: (Constant), EKS, SDM, SPI

b. Terikatt Variable: KUALLK

Sumber : Data primer 2011, diolah.

Tabel 10 menunjukkan bahwa besarnya nilai adjusted R² adalah 0,482 atau 48,2%. Hal ini berarti variabilitas variabel independen dalam penelitian ini, yakni kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal dapat menjelaskan variabel dependennya, yaitu kualitas informasi laporan keuangan sebesar 48,2%. Sisanya sebesar 51,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Tabel 11
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA^p

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1062.313	3	354.104	40.432	.000 ^a
	Residual	1085.992	124	8.758		
	Total	2148.305	127			

a. Predictors: (Constant), EKS, SDM, SPI

b. Dependent Variable: KUALLK

Sumber : Data primer 2011, diolah.

Pada Tabel 11 terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 40,432 dan signifikansi sebesar 0,00 atau di bawah nilai signifikan (α) 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal dapat memprediksi variabel kualitas informasi laporan keuangan.

Tabel 12
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.190	2.848		2.524	.013
	SDM	.330	.168	.156	1.966	.051
	SPI	.654	.096	.575	6.787	.000
	EKS	.118	.156	.053	.756	.451

a. Dependent Variable: KUALLK

Berdasarkan Tabel 12 di atas, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{KUALLK} = 7.190 + 0.330 \text{ SDM} + 0.654 \text{ SPI} + 0,118 \text{ EKS} + \varepsilon$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

1. Nilai konstanta 7.190 berarti bila variabel bebas diasumsikan konstan, maka kualitas informasi laporan keuangan bernilai 7.190.
2. Nilai koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (SDM) = 0.330 menyatakan bahwa setiap penambahan kapasitas sumber daya manusia sebesar satu satuan, akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.330.

3. Nilai koefisien regresi sistem pengendalian intern (SPI) = 0.654 menyatakan bahwa setiap penambahan kualitas sistem pengendalian intern sebesar satu satuan, akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.654.
4. Nilai koefisien regresi faktor eksternal (EKS) = 0,118 menyatakan bahwa setiap penambahan faktor eksternal sebesar satu satuan, akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,118.

Hipotesis 1 (H₁): Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki t-hitung sebesar 1,966 dengan signifikansi 0,051 (lihat tabel 12). Nilai signifikansi 0,051 lebih dari derajat kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis (H₁) ditolak.

Hasil di atas tidak konsisten dengan penelitian Xu *et al.* (2003) dan Choirunisah (2008) yang menemukan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan interaksinya dengan sistem berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan sebuah instansi. Tetapi hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaksignifikanan ini disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di DPKAD maupun DPPKD yang belum mendukung. Dari hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia di DPKAD dan DPPKD masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang maupun di Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.

Berdasar data demografi responden, terdapat fakta bahwa jumlah pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi masih kurang. Uraian tugas dan fungsi yang ada juga masih

terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan. Walaupun kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, hal ini belum dapat memaksimalkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Hipotesis 2 (H₂): Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

Hipotesis kedua (H₂) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki t-hitung sebesar 6,787 dengan signifikansi 0,000 (lihat tabel 12). Nilai signifikansi 0,000 kurang dari derajat kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis (H₂) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang (1) keandalan laporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, (3) efektifitas dan efisiensi operasi.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Choirunisah (2008) yang menemukan internal kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi. Sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga BPK memberikan opini Tidak wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebagian besar LKPD di Indonesia. Untuk LKPD kabupaten dan kota Semarang,

BPK memberikan opini WDP selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan SPI di pemerintahan kabupaten dan kota Semarang cukup baik walaupun belum dapat dikatakan baik sekali karena belum mendapat opini WTP. Semakin baik sistem pengendalian intern akan berdampak meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 3 (H₃): Faktor eksternal memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan, dan

Hipotesis 4 (H₄): faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern kualitas informasi laporan keuangan

Hipotesis ketiga (H₃) menyatakan bahwa faktor eksternal memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hipotesis keempat (H₄) menyatakan bahwa faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern kualitas informasi laporan keuangan. Tujuan pengujian H₃ dan H₄ adalah untuk menguji pengaruh faktor eksternal terhadap hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Dari hasil pengujian ditemukan adanya multikolonieritas atau dengan kata lain terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel bebas dalam model tersebut sehingga diharuskan untuk menghilangkan salah satu variabel bebas agar hasil dari pengujian model regresi dapat dipertanggungjawabkan dan *reliable*. Karena alasan tersebut, variabel yang dihilangkan adalah (1) variabel faktor eksternal sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas informasi laporan keuangan (2) variabel faktor eksternal sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh antara sistem pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi yang berpengaruh terhadap hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan, melainkan faktor eksternal dapat berpengaruh langsung kepada kualitas informasi laporan keuangan.

Dari hasil pengujian, faktor eksternal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,451 dengan nilai t-hitung 0,756. Karena nilai signifikansi berada jauh di atas tingkat signifikansi 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa faktor eksternal tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dinamika yang terdapat dalam berbagai peraturan, teknologi, dan sistem yang terus berubah dalam rangka perbaikan tidak didukung oleh kesiapan SDM dalam mengakomodasi perubahan tersebut (Dirjen Perbendaharaan, 2010).

Perubahan standar dan regulasi dalam akuntansi pemerintahan tidak sesering seperti yang terjadi di organisasi swasta. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintahan baru diademen satu kali sejak PP No. 24 Tahun 2005 dikeluarkan, yaitu menjadi PP No.71 Tahun 2010 yang baru akan diimplementasikan tahun 2014 mendatang. Terdapat perubahan jenis laporan dan basis penilaian.

Hasil di atas tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Xu, *et al.* (2003) yang menemukan bahwa faktor eksternal mempunyai dampak terhadap kualitas informasi akuntansi. Ketidakkonsistenan ini dapat menggambarkan hubungan yang lebih nyata kondisi pemerintahan daerah di Indonesia dalam kaitannya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia yang diprosikan dengan pemahaman staf, interaksi antara sumber daya manusia dengan sistem, kontrol terhadap sumber daya manusia, dan pendidikan serta training tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dipahami karena dari sisi jumlah, masih kekurangan pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai SKPD tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi

2. Sistem pengendalian intern yang diproksikan dengan integritas data, ketepatan input, prosedur otorisasi, penyimpanan dokumen sumber data, pemberian wewenang, penentuan kebijakan dan standar akuntansi, pelaksanaan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh pencapaian LKPD WDP untuk Kabupaten dan Kota Semarang. Walaupun belum mendapat opini tertinggi yaitu WTP, opini WDP cukup mengindikasikan bahwa SPI di kabupaten dan kota Semarang cukup baik.
3. Faktor eksternal yang diproksikan dengan kemajuan IT, perkembangan web dan internet, perubahan standar pelaporan, serta perubahan regulasi secara global tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hubungannya, faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini dapat dipahami karena perubahan standar dan regulasi dalam akuntansi pemerintahan tidak sesering seperti yang terjadi di organisasi swasta, disamping itu dinamika perubahan sistem, teknologi, peraturan dalam pemerintahan tidak diakomodasi dengan baik oleh kesiapan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut.

Keterbatasan

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Semarang, dikarenakan proses perijinan yang sedikit rumit dan menghabiskan banyak waktu.
2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah yang lain.
3. Variabel bebas yang dimasukkan dalam penelitian ini masih terbatas, tidak semua isu yang menjadi *trend* topik terkait kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya diharapkan menyempurnakan dan memperkuat hasil penelitian ini dengan memperluas area penelitian. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama juga dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Algifari. 1997. *Analisis Regresi, Teori, Kasus dan Solusi*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada
- Azhar, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Tesis Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Azwar. 1997. *Metode Penelitian Jilid I*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari, 2004, "Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah."
- Belkaoui, Ahmed. 2001. *Teori Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011*. Jakarta
- Choirunisah, Fariziah. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi*. Tesis Maksi UGM, Yogyakarta.
- Freeman, Robert J., and Shoulder, Craig D.. (2008). *Governmental and Nonprofit Accounting Theory and Practice*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson International Edition
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.

- Guy, Dan.M, C. Wayne Alderman, Alan J. Winters. 2002. *Auditing Jilid 1*. 5th edition. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., dan Black, W.C. 1998. *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Prentice Hall
- Huda, Ulul. 2009. "Hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kekuasaan Lokal; Sebuah Penilaian Mengenai Dampak yang Ditimbulkan", http://ululbanyuwangi.blog.com/2009/10/16/hubungan-teknologi_informasi-dan-komunikasi-dengan-kekuasaan-lokal-sebuah-penilaian-mengenai-dampak-yang-ditimbulkan/. diakses 20 April 2011.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir). *SNA XI Pontianak*
- Kast, F.E. and Rosenzweig, J.E. 1985. *Organization and Management. A Systems and Contingency Analysis*. 4th Edition. New York: McGraw-Hill
- Kharis, Abdul, 2010, Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian, Skripsi UPN Veteran, Jawa Timur.
- Kiswara, Endang, 2011, *Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda*. PhD thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kurniawan, Hendry. 2010. "Pengaruh Motivasi Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai", http://id.shvoong.com/business_management/1976043-pengaruh-motivasi-kerja-dan_budaya/#ixzz1e2bVgRFp. diakses 14 April 2010..
- Lillrank, Paul. 2003. "The quality of information", *International Journal of Quality & Reliability Management* Vol. 20 No. 6 pp. 691-703.
- Mainardes,E.W., Alves, H. and Mario Raposo. 2011. "Stakeholder theory: issue to resolve". *Management Decision* vol 49 No. 2, 2011, 226-252.
- Nugraha, Darya setya dan Apriyanti susanti. 2010. *The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 2 No. 2, h. 259-280

- Petrovits, Christine; Shakespeare, Catherine; Shih, Aimee. 2011. "[The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations](#)" *Accounting Review*, Jan2011, Vol. 86 Issue 1, p325-357.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Direktorat Jendral Perbendaharaan RI. 2010. Laporan Manajerial "Kajian Terhadap Suspen dan Upaya Meningkatkan Keandalan Data Laporan Keuangan". Jakarta
- Sawyer et al. 2005. Sawyer's Internal Auditing-Buku 1. 5th ed. Salemba empat. Jakarta. Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2003. Research Methods For Business: Skill-Building Approach, 4th Editon, John Wiley & Sons, Inc.
- Sutaryo. 2011. "Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan E-Government System", <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/2011/06/20/nilai-laporan-keuangan-pemerintah-dengan-e-government-system/>, diakses 1 Agustus 2011
- Tee Sing What, Paul L. Bowen, Peta Doyle, Fiona H. Rohde, 2007, "Factors influencing organizations to improve data quality in their information systems", *Journal compilation*
- Warisno, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Longkungan Pemerintah Provinsi Jambi*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. SNA XIII Purwokerto*
- Xu, Hongjiang, Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin. 2003. "Key issue of accounting information quality management : Australian case studies". *Industrial Mngaement & Data System* 103/7, 461- 470